

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi, karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya manusia. Kemiskinan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan, dimana penurunan kemiskinan menandakan adanya pertumbuhan yang adil dan merata. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesia adalah tingginya ketimpangan antar daerah dan golongan masyarakat, akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Kemiskinan dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengelola potensi yang dimiliki.

Penelitian ini mengambil studi pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di peringkat ke 19 sebagai daerah dengan kemiskinan 8,99 persen. Hal ini cukup baik karena berada di bawah persentase kemiskinan nasional. Berikut ini hasil dari penelitian sesuai dengan data yang telah diolah;

1. Rasio solvabilitas anggaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan nilai yang baik. Hal ini terlihat dari nilai rasio solvabilitas anggaran yaitu $> 1,0$.
2. Rasio solvabilitas layanan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai yang variatif dan timpang, yaitu wilayah kabupaten

dengan rasio rendah sedangkan wilayah kota dengan rasio tinggi. Selain itu, rasio solvabilitas layanan juga kurang memadai pada sisi belanja modal yang sangat rendah.

3. Rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang sangat rendah karena 23 kabupaten/kota berada dibawah 25% sedangkan Kota Makassar menjadi satu-satunya yang memiliki kemandirian keuangan dengan klasifikasi rendah yaitu 36,2%.
4. Indeks rasio solvabilitas anggaran yang baik belum tentu dapat mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat pada rasio solvabilitas anggaran yang tinggi tetapi tidak mampu menekan angka kemiskinan. Hal ini terjadi pada delapan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan rasio solvabilitas anggaran yang rendah belum tentu tidak mampu menekan angka kemiskinan contohnya di empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Beberapa pemerintah daerah yaitu 62% diantara 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah cukup berhasil menekan kemiskinan dengan rasio solvabilitas layanan. Sisanya tidak mampu mengoptimalkan angka kemiskinan karena memang memiliki rasio solvabilitas layanan yang rendah dan bahkan dengan rasio solvabilitas layanan yang tinggi.
6. Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mampu menekan angka kemiskinan meskipun dengan kemandirian keuangan yang rendah yaitu sebanyak 58% diantaranya. Satu diantara 24 daerah dengan kemandirian keuangan tinggi dengan tingkat kemiskinan

rendah adalah Kota Makassar, yang berarti mampu mengoptimalkan kemandirian keuangannya untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan. Sedangkan sisanya merupakan pemerintah daerah dengan kemandirian keuangan yang rendah diikuti tingkat kemiskinan yang tinggi.

7. Hasil klasterisasi kondisi keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 5.1
Matriks Klaster Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Klaster	Solvabilitas Anggaran	Solvabilitas Layanan	Kemandirian Keuangan
1	Makassar	Luwu Timur, Palopo, Bantaeng, Makassar, Soppeng, Barru, Pare-Pare	Makassar
2	-	Kep. Selayar	-
3	Jeneponto, Pangkajene Kep, Luwu Utara, Luwu, Enrekang, Kep. Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone	Jeneponto, Pangkajene Kep, Luwu Utara, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Bone	Jeneponto, Pangkajene Kep, Luwu Utara, Luwu, Enrekang, Kep. Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone
4	Luwu Timur, Pare-Pare, Sidenreng Rappang, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Gowa, Barru, Pinrang, Bantaeng, Sinjai, Takalar, Palopo, Maros	Takalar, Sidenreng Rappang, Gowa, Bulukumba, Pinrang, Wajo, Sinjai, Maros	Luwu Timur, Pare-Pare, Sidenreng Rappang, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Gowa, Barru, Pinrang, Bantaeng, Sinjai, Takalar, Palopo, Maros

Sumber: Kalkulasi Penulis dengan Ms. Excel

B. Keterbatasan

Hasil dari penelitian ini sebagaimana hanya dilakukan pada daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan maka dari itu tidak dapat dijadikan gambaran

umum maupun sebagai perbandingan bagi daerah lain. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diambil dari *website* pemerintah yang beberapa di antaranya memerlukan akses khusus, sehingga terdapat data yang angkanya telah konversi kedalam satuan nominal yang dibutuhkan.

Peneliti tidak terjun langsung ke daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menyebabkan kurangnya informasi dari pemerintah daerah mengenai kendala yang terjadi pada setiap daerah. Sehubungan dengan adanya beberapa daerah dengan tingkat rasio keuangan yang baik namun belum mampu menekan angka kemiskinan di daerah masing-masing. Kurangnya sumber teori pendukung menurut para ahli akibat keterbatasan penulis juga menjadi kekurangan dalam penelitian ini, maka dengan mengandalkan jurnal dan penelitian sebelumnya penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada daerah kabupaten/kota lain di Indonesia guna memperkaya referensi mengenai penelitian serupa. Daerah lain yang dimaksudkan adalah kabupaten/kota yang ada diluar provinsi Sulawesi Selatan.

Saran selanjutnya untuk penelitian setelah ini diharapkan dapat mengakses data yang lebih lengkap dan tidak hanya bergantung pada data yang terdapat di *website*

sehingga perhitungan dapat dilakukan menggunakan angka asli tanpa harus dikonversi. Saran berikutnya untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan informasi dari pemerintah daerah yang bersangkutan bila mana terdapat rasio keuangan yang baik namun belum mampu mengentaskan kemiskinan di daerahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdyo, & Permadi, H. (1999). *Metode Statistika Praktis*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Akhmad. (2015). Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan pada Sepuluh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian UNM*, ISSN 2460-1322.
- arsyad, l. (t.thn.).
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Astuti, S., & Mispiyanti. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 384-398.
- Biro Analisa Anggaran SETJEN DPR RI. (2021). Anggaran Kemiskinan dan Infrastruktur dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Penurunan Kemiskinan. *Laporan Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Tahun 2020*, 1-14.
- BPS RI. (2021, April 29). *Indeks Gini Rasio Indonesia 2020*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html>
- BPS RI. (2021, April 29). *Konsep Kemiskinan, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- BPS RI. (2021, April 29). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- BPS RI. (2021, April 29). *Persentase Penduduk Miskin tahun 2020*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/indicator/23/207/1/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemisikinan.html>
- Collis, J., & Hussey, R. (2014). *Business Research: A Practical Guide fo Undergraduate & Postgraduate Student*. London: Sffron House.

- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 13 Nomor 1 Hlm. 72-82.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hafidh, A. A. (2013). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18 No. 2 Hlm. 109-120.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hardinandar, F. (2020). Peran Kebijakan Fiskal terhadap Trade-off antara Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal INOVASI*, Vol. 16 NO. 1 Hal. 1-10.
- Harmadi, S. H. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Lisna et al, V. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 14 No. 1 Hlm. 1-26.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Magelang dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Volume 2 No. 2 Hal. 139-162.
- Mizkan, H., Kamaliah, & Agusti, R. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Jurnal SOROT, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau*, Volume 10 Nomor 1.
- Nizar, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Nollenberger, K., & et al. (2003). *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Governement*. Washington DC: International City County Managers Association.
- Nugraheni, D., & Priyarsono, D. (2012). Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 12 No. 2.

- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Among Makarti*, Vol. 7 No. 13 Hlm. 83-112.
- Primawaty, A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011-2015. *Accounting and Business Information Systems*, Volume 5 Nomor 1.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: Wade Group.
- Purwoko, H. B. (2016). Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (SJS) di Indonesia dalam Perspektif Internasional. *Journal WIDYA Ekonomika*, Volume 1 Nomor 1 Halaman 75-86.
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol 01 No 2 Hal 17-33.
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Penerbit Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utara Press.
- Suryani, & Faisal, H. B. (2016). Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten di Aceh dan di Sumatera Utara. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 23 No. 1 Hal. 63-71.
- Talakua, M. W., Leleury, Z. A., & Talluta, A. W. (2017). Analisis Cluster Dengan Menggunakan Metode K-Means Untuk Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, Volume 11 Nomor 2 Hal. 119-128.
- Tan, P.N., Steinbach, M., Kumar, V. (2006). *Introduction to Data Mining*. Boston: Pearson Education.
- Taufikurohman et al. (2011). Dampak Kebijakan Fiskal untuk Subsidi Pangan Terhadap Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 2 Nomor 2 Halaman 171-182.
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 1 Hal. 32-47.

- TNP2K. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia.
- Wadma, S. (2016). Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan. *Jurnal Warta*, Edisi 50.
- Wadma, S. (2016). Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan. *Jurnal Warta*, Edisi 50.
- Yati, I. M., & Asmara, J. A. (2020). Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 5 No. 2 Halaman 297-306.
- Zahra, A., Fatin, A., Afuwu, H., & Auliyah, R. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan, dan Kelayakan Hidup? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Vol. 04 No. 02 Page 67-74.

